



KABUPATEN MOJOKERTO

Nomor : 700/492.10/416-034/2025
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi (AKIP) Tahun 2025

Mojokerto, 15 September 2025

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto
di
Mojokerto

Dengan ini kami sampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara khusus Evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup Evaluasi AKIP meliputi penilaian atas keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Evaluasi AKIP mulai tahun 2025 dilaksanakan melalui aplikasi Penilaian Mandiri Internal (PMI) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Mojokerto Nomor 069.5/4301/416-034/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Langkah ini dilakukan agar penilaian evaluasi AKIP terintegrasi, terdokumentasi lebih baik, lebih transparan, akuntabel dan objektif, sehingga mendapatkan hasil evaluasi yang lebih berkualitas. Selain adanya evaluasi berbasis elektronik juga didukung Tim Evaluasi AKIP kolaborasi dari Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi pada komponen evaluasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/244 /HK/416-012/2025.

2. Komponen dan Penilaian Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
3.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
			kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator.
4.	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.
5.	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	> 30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas pelaksanaan AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto menunjukkan nilai sebesar **86,34** dengan predikat **A (Memuaskan)**.

Pencapaian predikat **A (Memuaskan)**, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto, dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2024	Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30,00	25,20	26,44
b. Pengukuran Kinerja	30,00	27,00	27,38
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,60	13,29
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,00	19,23
Jumlah	100,00	85,80	86,34

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi keselarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,44** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- 1) Renstra 2025-2029 belum ditetapkan karena saat evaluasi sapkib berlangsung, RPJMD 2025-2029 belum disahkan.
- 2) Perencanaan Kinerja sudah cukup selaras. Kedepannya mohon dapat menjaga konsistensi serta meningkatkan perencanaan kinerja di lingkup perangkat daerah.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,38** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- 1) Pengukuran Kinerja sudah cukup baik. Kedepannya mohon dapat meningkatkan pengukuran kinerja di lingkup perangkat daerah hingga level individu pegawai.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,29** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- 1) Laporan kinerja sudah dilengkapi faktor kegagalan/hambatan, faktor keberhasilan dan rencana tindak lanjut pada sasaran strategis. Namun,

belum diberikan faktor kegagalan/hambatan, faktor keberhasilan dan rencana tindak lanjut pada kinerja lainnya.

- 2) Analisis dalam laporan kinerja belum menunjukkan secara jelas program/kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi internal perangkat daerah secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai serta upaya pemanfaatan hasil tindak lanjut evaluasi sebelumnya.

Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **19,23** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tersebut sebagai berikut :

- 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkala dan disajikan pada dokumen E-81, akan tetapi perangkat daerah belum menganalisa secara spesifik faktor penghambat atas ketidakcapaian kinerja yang ditetapkan. Contoh: hasil evaluasi belum menguraikan faktor penghambat atas ketidakcapaian target kinerja pada sub kegiatan penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota pada triwulan 1.
- 2) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja atas sasaran strategis disajikan pada dokumen LKjIP. Akan tetapi, evaluasi belum sepenuhnya dilaksanakan secara mendalam. Perangkat Daerah belum menganalisis upaya yang telah dilaksanakan dalam mendukung keberhasilan atas capaian kinerja sasaran strategis.
- 3) Perangkat Daerah telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Tahun 2024. Namun, hasil tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam rangka perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sehingga masih ditemukan rekomendasi berulang atas Evaluasi AKIP tahun 2025.
- 4) Dokumen laporan kinerja belum menggambarkan adanya pemanfaatan hasil evaluasi AKIP dalam mendukung efektifitas dan efisiensi Kinerja.

4. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang **direkomendasikan** kepada Tim AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

- a. Menetapkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Memastikan pengukuran kinerja di lingkup perangkat daerah hingga level individu pegawai.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Penyusunan laporan kinerja dilengkapi secara menyeluruh dengan mencantumkan faktor kegagalan/hambatan, faktor keberhasilan, serta rencana tindak lanjut tidak hanya pada sasaran strategis, tetapi juga pada seluruh kinerja lainnya untuk memastikan evaluasi yang komprehensif dan perbaikan berkelanjutan.
- b. Untuk memperkuat laporan kinerja, disarankan adanya pendalaman analisis terhadap program/kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Menyempurnakan evaluasi akuntabilitas kinerja berkala yang telah dilaksanakan dengan memastikan hasil analisa (faktor pendorong, penghambat dan upaya tindak lanjut) telah sesuai dengan capaian kinerja perangkat daerah.
- b. Menyempurnakan evaluasi akuntabilitas kinerja atas sasaran strategis perangkat daerah yang disajikan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan menyajikan upaya yang telah dilaksanakan dalam mendukung keberhasilan atas capaian kinerja.
- c. Mengimplementasikan dan memanfaatkan tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam rangka perbaikan sistem internal perangkat daerah, serta menyusun bukti dukung yang memadai atas perbaikan yang dilaksanakan.
- d. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, diantaranya dengan menyajikan uraian penyebab efisiensi dan merumuskan hasil efisiensi perangkat daerah tahun lalu dalam mendukung peningkatan capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang memiliki kontribusi signifikan pada sasaran strategis.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Kami minta agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan upaya yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

a.n. Bupati Mojokerto
Sekretaris Daerah,



Teguh Gunarko

Tembusan:

1. Bapak Bupati
2. Tim Evaluasi SAKIP